

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Alatas, S. H. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Chaerudin et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-2. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UU RI No. 30 Tahun 1999 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001, Versi UU RI No. 30 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Effendy, Marwan. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. (Jakarta: Referensi, 2012).
- Fajar, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015).

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998).
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Cetakan ke-1. (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2006)
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Againsts Corruption (UNCAC)*. Cetakan ke-1. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Kuffal, H.M.A *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Cetakan ke-3. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003).
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Penegakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1984).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*. (Semarang: BP Undip, 2007).
- Nelson, Febby Mutiara. *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Depok: PT. Raja Garfindo Persada, 2020).
- Nurdjana. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Pidana Khusus – Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerja sama Internasional serta Pengembalian Aset*. (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016).
- Purbopranoto, Kontjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1981).
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. (Depok: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993).
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).

- Sadjijono. *Hukum antara Sollen dan Sein*. Cetakan ke-2, (Surabaya: UBHARA Press & LaksBang Pressindo, 2017).
- Syamsudin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sidharta, Arief. *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 1986).
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

#### **b. Perundang-undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401)*.

Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

**c. Jurnal**

Mumu, Gratia Debora, Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, Maret 2016.

Armunanto Hutahaean & Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 16 No.1, Maret 2019.

Nani Widya Sari, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017.

**d. Putusan**

\_\_\_\_\_Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID.SUS/2019 tanggal 13 Agustus 2019.

**e. Internet**

Anonim, “Kewenangan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, 09 Agustus 2020.

Packer, Herbert L. “Two Models of the Criminal Process”. [My.ilstu.edu/~mgizzi/packer.pdf](http://My.ilstu.edu/~mgizzi/packer.pdf). 5 November 2020.